

DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA SEBUAH REFLEKSI HISTORIS

by Mukodi Mukodi

Submission date: 12-Dec-2018 06:50PM (UTC-0800)

Submission ID: 1056153787

File name: A_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_DI_INDONESIA_SEBUAH_REFLEKSI_HISTORIS.pdf (800.63K)

Word count: 4051

Character count: 27133

DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA SEBUAH REFLEKSI HISTORIS

Mukodi

STKIP PGRI Pacitan
e-mail: mukodi@yahoo.com

Abstrak:

Kebijakan pendidikan adalah bagian strategis yang dapat dilaksanakan dalam perbaikan kualitas pendidikan. Sejak era orde lama, orde baru hingga era reformasi pun kebijakan pendidikan senantiasa digunakan sebagai titik tumpu dalam melaksanakan pembangunan. Pelbagai persoalan pendidikan di Indonesia dapat diatasi melalui tiga perbaikan, yakni: (1) perbaikan kualitas sumber daya manusia; (2) perbaikan kualitas struktur pendidikan; (3) perbaikan kualitas kultur pendidikan.

Kata kunci: kebijakan, pendidikan, sumber daya manusia, dan perbaikan.

PENDAHULUAN

Persoalan kebangsaan hingga kini masih ditandai oleh radikalisme, intoleransi, separatisme, narkoba, kerusakan lingkungan, kekerasan, pengangguran, dan ketidaksiapan menghadapi era digital serta MEA. Penanda-penanda ini lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Walau harus diakui, kualitas SDM selama dua tahun terakhir telah mengalami peningkatan. Hanya saja, jika dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand Indonesia masih tertinggal.

Kualitas SDM di Indonesia dapat diperbaiki, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan pun menjadi tumpuhan, sekaligus hajat banyak pihak. Pendidikan diyakini sebagai variabel terpenting, strategis, dan determinatif bagi perubahan masyarakat. Maju mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat sangat bergantung pada bagaimana kualitas pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang menyadari dan memahami makna strategisnya pendidikanlah yang mampu meraih kemajuan dan menguasai dunia. Pendidikan merupakan alat terefektif bagi perubahan masyarakat dan pencapaian kemajuan dalam berbagai dimensi kehidupan (Mukodi, 2015).

Tak ayal, pendidikan saat ini adalah cerminan kualitas SDM di masa depan. Tak heran, jika Kuang Tzu, Bapak Taoisme pernah berkata, “Kalau kita mau memetik hasil setahun, tanamlah sayuran. Kalau kita mau menikmati hasil sepuluh tahun, budidayakan buah-buahan. Tapi, kalau kita mau menuai hasil untuk 100 tahun, tanamlah manusia”.

Poin terpenting yang harus dipahami adalah bahwa pendidikan (dunia persekolahan) di Indonesia dari rezim ke rezim penuh dengan dinamika, dan persoalan. Sebut saja, diantaranya mulai dari persoalan konsep dan arah pendidikan, ketidakjelasan kebijakan dan sistem yang melingkupinya, serta buruknya metode pengajaran, dan evaluasi pengajarannya.

Menurut Azyumardi Azra dalam (Nurtanio Agus Purwanto, 2008) persoalan diranah pendidikan adalah sebagai berikut:

(1) terbatasnya kesempatan mendapatkan pendidikan (*limited capacity*); (2) sentralisasi kebijakan pendidikan nasional dan menekankan pada uniformitas (keseragaman). Akibat dari kebijakan ini adalah gagalnya pendidikan merespon tuntutan *stakeholders* dan masyarakat luas. Kondisi demikian mengakibatkan semakin meningkatnya pengangguran terdidik; (3) minimnya dana pendidikan. Persoalan dana hingga saat ini masih sangat rumit, hal itu cukup beralasan mengingat pemerintah kita belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan; (4) masih timpangnya akuntabilitas yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan kualitas pendidikan. Ketimpangan sosial, budaya dan ekonomi diberbagai wilayah menjadikan kesulitan dalam pencapaian kualitas yang *standardized* dalam *basic potencies* khususnya; (5) belum memadainya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Jumlah guru dan tenaga kependidikan kita bisa dikatakan mencukupi tetapi tidak demikian dari sisi kualitas, masih banyak dari mereka yang masih *unqualified*, *underqualified*, dan *mismatch* sehingga kurang mengangkat kualitas pendidikan; (6) relevansi. Hingga saat ini masih terdapat ketimpangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat karena lembaga pendidikan kurang peka dan mampu menangkap dan merespon aspirasi masyarakat.

Sementara itu, menurut Zamroni dalam (Nurtanio Agus Purwanto, 2008) berpendapat mengenai pentingnya dilakukan restrukturisasi dan deregulasi pendidikan yang mencakup empat aspek yaitu: (a) orientasi pembelajaran siswa; (b) profesionalitas guru; (c) akuntabilitas sekolah, dan; (d) partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Di sisi lainnya, menurut Subandi Sardjoko, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS mengatakan bahwa guru yang berkualitas menjadi kunci seluruh proses pendidikan. Berikut kutipan lengkapnya:

Mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. Kurikulum merupakan faktor sekunder saja, sebab efektivitas pelaksanaan kurikulum pun bergantung pada kualitas guru. Peran guru sangat vital dalam kegiatan pembelajaran, yang berpengaruh langsung pada tinggi-rendahnya kualitas pendidikan. Kualitas guru merupakan faktor determinan terhadap mutu pembelajaran di kelas, yang tercermin pada hasil belajar murid (*student learning outcomes*). Buku merupakan sumber pengetahuan, tetapi melalui guru pengetahuan dapat ditransmisikan kepada peserta didik. Guru adalah sosok yang menjadi sumber pembelajaran dan praktik pendidikan di sekolah. Guru dengan kompetensi tinggi, baik dalam hal penguasaan *subject knowledge* maupun *pedagogical knowledge*, berpengaruh langsung pada hasil belajar murid, yang tercermin pada pencapaian akademik tinggi. Metode pengajaran juga berpengaruh besar terhadap efektivitas

pembelajaran, yang ditandai oleh kemampuan siswa dalam menyerap dan mencerna materi pelajaran (Sardjoko, 2016).

Gambaran persoalan tersebut di atas, jika ditilik secara filosofis berpangkal pada kebijakan—*momot* politik—di bidang pendidikan. Persoalan kebijakan pendidikan ditengarai menjadi persoalan krusial di Indonesia. Sejak era penjajahan, bahkan kemerdekaan—baik, orde lama, orde baru, maupun reformasi—kebijakan pendidikan menjadi zona “terseksi” dalam perjanjian kehidupan berbangsa dan bernegara. Di area inilah artikel ini berupaya mengungkap dinamika pendidikan di Indonesia yang meliputi: (1) kebijakan pendidikan di era orde lama; (2) kebijakan pendidikan di era orde baru; (3) kebijakan pendidikan di era reformasi; (4) Refleksi historis dunia pendidikan di Indonesia; (5) persoalan dan tantangan pendidikan di masa mendatang. Kelima sub bahasan tersebut, nanti tidak akan dibahas secara detail, tetapi hanya sekilas pandang, dan akan difokuskan pada persoalan yang krusial semata.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA ORDE LAMA

Dasar-dasar pendidikan yang diletakkan suatu rezim pemerintahan pada hakikatnya berpangkal pada dinamika perpolitikan kebangsaan. Lebih praktis lagi, pendidikan selalu berpaut pada politik kepentingan kepemimpinan (*leadership*) berkuasa. Menurut M. Sirozi, dalam (Malla, 2011) bahwa hubungan antara pendidikan dan politik saling terkait karena pendidikan berperan besar dalam integrasi sistem politik. Apabila pendidikan tidak sanggup berperan menjalankan fungsi integratifnya akan muncul tekanan dan hambatan yang harus dihadapi oleh sistem politik. Kebijakan pendidikan di era orde baru pun demikian adanya, di waktu itu setidaknya ada dua kebijakan pendidikan yang dominan, yakni: arah pendidikan, dan pemerataan pendidikan.

Arah pendidikan di masa orde lama dapat dicermati dari kebijakan Menteri pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan mengeluarkan Instruksi Umum, yang isinya menyerukan kepada para pengurus upaya membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme (Tilaar, 1995). Sosialisme Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah, di tingkatan kebijakan, sampai penerapannya dilingkungan pendidikan formal, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, merupakan salah satu cara menyelaraskan tujuan pendidikan dengan tujuan negara. Pemerintah membuat suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut, dan lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewargaan Negara atau *Civics*, yang diajarkan di tingkat SMP dan SMA. Kebijakan pendidikan pada masa ini disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu pendidikan sosialisme Indonesia oleh pemerintahan Ir. Soekarno (1961-1966) (Hartono, 1999).

Sementara itu, kebijakan pemerataan pendidikan di orde lama dituangkan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550). Kemudian pelaksanaannya pun ditegaskan dalam UU No.12 Tahun 1954, tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38. Tambahan lembaran Negara Nomor 550). Tujuan dan dasar pendidikan pada Orde Lama dapat dilihat pada pasal 3 dan 4. Pasal 3 menyebutkan bahwa “Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah

air”. Sementara itu, pasal 4 berbunyi: “Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”. Konsep pendidikan ini akhirnya berakhir ketika pada tahun 1965 (Hartono, 1999).

Di masa orde lama, kebijakan pendidikan diletakkan sebagai bangunan fundamental pembangunan, sekaligus penguatan sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana termaninvestasikan melalui perundangan. UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 1 tentang Sapta Usaha Tama tahun 1959, dan Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tentang Panca Wardhana/Hari Krida tahun 1961. Produk-produk perundangan tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah di bidang pendidikan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA ORDE BARU

Pembangunan pendidikan di masa orde baru dilaksanakan melalui tahap-tahapan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT-I) dan PJPT-II, dan berujung pada orde reformasi 1998.

Menurut (Tilaar, 1995) orde baru menandakan lahirnya suatu orde pembangunan yang ingin membawa bangsa dan masyarakat Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen. Hal tersebut dinyatakan di dalam TAP MPRS No. LI/ MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Sementara itu, pembangunan bidang pendidikan didasarkan kepada TAP MPPRS RI No. XXVII/ MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut, tentang pendidikan digariskan sebagai berikut:

Sebagai dasar pendidikan ialah falsafah negara Pancasila. Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan tersebut maka isi pendidikan adalah sebagai berikut: (1) mempertinggi mental/ moral/ budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama; (2) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan; (3) membina/ memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat (Tilaar, 1995).

Produk-produk hukum terkait dengan perbaikan di bidang pendidikan setelah TAP MPRS tersebut sangat beragam, diantaranya: (1) Ketetapan Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, Kebudayaan; (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia; (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tanggal 13 September Tahun 1974 Pokok-Pokok Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan dan Latihan; (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tanggal 13 September Tahun 1974 Pokok-Pokok Pembinaan Pendidikan Umum dan Kejuruan; (5) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tanggal 13 September Tahun 1974 Pokok-Pokok Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Khusus Bagi Pegawai Negeri. Selain itu, disetiap pidato pertanggung jawaban Presiden/ Mandataris di sidang umum MPR persoalan pendidikan nasional menjadi salah satu pokok perhatian presiden.

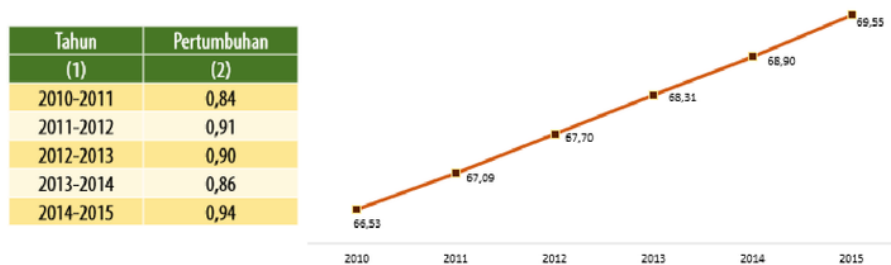
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA REFORMASI

Di era reformasi setidaknya ada empat kebijakan pendidikan yang menjadi agenda perbaikan sistem pendidikan nasional. Keempat program di bidang pendidikan yaitu: (1) peningkatan mutu pendidikan; (2) efisiensi pengelolaan pendidikan; (3) relevansi pendidikan, dan (4) pemerataan pelayanan pendidikan. Empat isu utama di bidang pendidikan tersebut, di dasarkan kepada keinginan dan tuntutan bangsa Indonesia berkaitan dengan peningkatan kualitas serta mempermudah dan mempercepat pelayanan di bidang pendidikan. Selain itu, paradigma baru dalam bidang pendidikan adalah menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu isu utama dalam setiap kebijakan pemerintah, baik dalam substansi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas maupun Peraturan Pemerintah yang mengikutinya, karena dianggap bahwa agama sebagai dasar pembentukan karakter bangsa, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya (Malla, 2011).

Kebijakan pendidikan di era reformasi walaupun belum sepenuhnya berhasil, tapi sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini terbukti dari capaian Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun semakin baik. Capaian pembangunan manusia di Indonesia secara umum terus menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 1999 dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia turun menjadi 64,30 poin dari capaian 67,70 poin pada tahun 1962. Pada tahun-tahun berikutnya IPM Indonesia selalu meningkat dari 65,80 pada tahun 2002, meningkat menjadi 68,69 pada tahun 2004, hingga pada tahun 2010 mencapai 72,27 (Statistik, 2011).

Berdasarkan catatan BPS pada 2015 tercatat pembangunan manusia di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, capaian IPM di Indonesia sudah mencapai 69,55. Angka ini meningkat 0,65 poin dari tahun 2014 dimana capaian pada tahun 2014 sebesar 68,90. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. Jika dilihat dari trennya, IPM yang merupakan salah satu alat ukur pembangunan manusia mengalami kenaikan. Dalam lima tahun saja, terjadi kenaikan IPM hingga 3,02 poin sebagaimana gambar 1 (Statistik, 2016).

Gambar 1
Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, 2010-2015



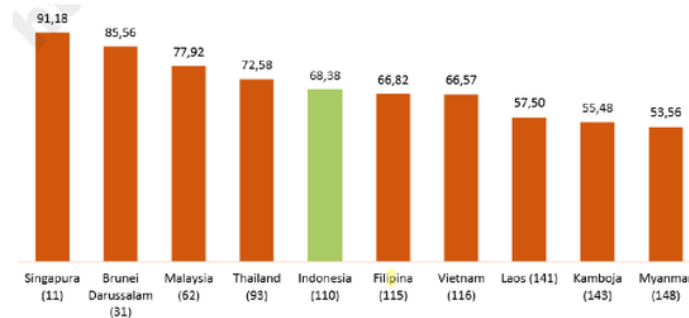
Sumber : Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, pada tahun 2014 UNDP mencatat IPM di Indonesia mencapai 68,38 dan masih menyandang predikat “Sedang” dalam status pembangunan manusia. Meskipun telah

berstatus “Sedang”, Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 188 negara di tahun 2014, naik tiga peringkat dari tahun 2009. Sementara itu, di ASEAN Indonesia berada pada posisi ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand (Statistik, 2016). Lihat gambar 2 berikut dibawah ini:

Gambar 2.

Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN, 2014



Gambaran IPM tersebut di atas, sebagai penanda bahwa pembangunan di Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Dengan demikian, kebijakan di bidang pendidikan pun terbukti efektif dalam meningkatkan indikator kinerja yang mendukung peningkatan IPM.

REFLEKSI HISTORIS ARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

Orientasi pendidikan nasional di masa pra kemerdekaan di pemerintahan Belanda adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan perjuangan politik menuju kemerdekaan (Buchori, 1994). Dimasa perjuangan ini, semua tenaga dan pikiran pendidikan nasional dijadikan sebagai alat perjuangan kemerdekaan. Hal ini tercermin dari berdirinya organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh para pelajar. Sebut saja berdirinya *Trikoro Dharmo*, atau tiga tujuan mulia, yang didirikan oleh Dr. R. Satiman (17 Maret 1915). Lahirnya *Trikoro Dharmo* ini mengilhami berdirinya gerakan Jong Java, Jong Sumatera (1917), Jong Ambon (1910), Jong Minahas (1919), Jong Celebes, Jong Batak, Sekar Rukun Pemuda Sunda (1920), Pemuda Timor, Pemuda Betawi hingga Budi Utomo (Tilaar, 1995).

Sementara itu, pendidikan nasional di masa pemerintahan Jepang berorientasi melakukan berbagai intervensi administratif untuk mencairkan kembali sistem pendidikan Indonesia yang menjadi beku sejak pemerintahan Hindia Belanda. Lebih dari itu, pewajahan pendidikan nasional mulai menunjukkan tanda-tanda profesional dibandingkan masa kolonial Belanda (Buchori, 1994). Namun demikian, usaha perbaikan pendidikan di masa Jepang ini hanya didasarkan atas keterpaksaan semata, bukan atas niatan luhur memberdayakan masyarakat pribumi.

Di era orde lama, (masa awal kemerdekaan) urusan pendidikan dan kebijakan didalamnya diserahkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya saja penamaan kementeriannya berbeda-beda. Perbedaan penamaan seolah menjadi tanda bahwa arah dan tujuan pendidikan nasional acapkali “tidak konsisten” dari kabinet satu ke kabinet lainnya. Alih kata, arah dan tujuan pendidikan nasional dimasa orde lama tengah mencari performa terbaiknya. Sebut saja, dimasa Ki Hadjar Dewantara (19 Agustus 1945-14 November 1945)

bahkan di masa Muhammad Muhadjir (2016-sekarang) penamaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional acapkali berganti-ganti. Yakni, mulai dari Menteri Pengajaran, Menteri Muda Pengajaran, Menteri Negara Urusan Pemuda, Menteri P.P. dan K, Departemen P. dan K, Menteri Muda Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Kemudian periode 1945-1949 orientasi pendidikan digunakan sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan (Buchori, 1994). Di samping itu, arah dan tujuan pendidikan di masa orde lama berorientasi pada penguatan sumber daya manusia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa “tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” (Tilaar, 1995). Selanjutnya, selama periode 1950-1965 (penghujung orde lama) sistem pendidikan nasional berorientasi pada aksesibilitas pendidikan. Bahkan, menurut Mochtar Buchori aksesibilitas pendidikan berjalan dengan sangat cepat, dan melampaui batas-batas kemampuan yang secara nyata dimiliki oleh kekuatan pendidikan nasional kita pada waktu itu (Buchori, 1994).

Kemudian, runtuhnya orde lama ke tangan orde baru dimasa awal menjadi angin segar dalam dunia pendidikan. Hal itu dikarenakan pendidikan nasional merupakan bidang garapan pembangunan nasional yang tertuang pada PJP-I. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu prestasi besar yang telah dicapai dalam PJP-I ini. Kemudian bergeser pada PJP-II sebagai tanda bahwa Indonesia tengah memasuki era tinggal landas. Namun demikian, PJP-II ditandai polemik yang mengiringinya, yakni perubahan strategi pembangunan dari *Widjojonomics* menjadi *Habibienomics*. Alih kata, tarik menarik domain pembangunan dari prioritas keunggulan komparatif—ciri khas *Widjojonomics*—menuju prioritas keunggulan kompetitif—ciri khas *Habibienomics* (Tilaar, 1995). *Alhasil*, pembangunan *ala Habibienomics* lebih dominan. Bahkan, di era BJ. Habibie menjadi Menteri Ristek pabrikan [PT Dirgantara Indonesia](#) (DI) berjaya. Pesawat terbang CN-235, CN-250 Gatotkacaberhasil diorbitkan dan menorehkan sejarah emas. Sayangnya, Indonesia waktu itu gagal dalam pemasaran. Barter pesawat terbang dengan bahan pokok beras ketan di Negara Thailand pun menjadi isu negatif (Pratomo, 2015).

Sementara itu, tumbangnya rezim orde baru akibat tuntutan arus reformasi pada tahun 1998 berdampak terhadap perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan pun bergeser tumpuannya dari PJP-II menuju tuntutan reformasi. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah produk perundangan yang keluar dari rahim era reformasi. Tujuan pendidikan pun mulai menemukan titik pijak yang lebih kuat. Jika, tujuan pendidikan yang tercantum pada TAP MPRS-RI No. XXVII/MPRS/1996 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal 3 “membentuk manusia Pantjasilais sedjati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945” (Tilaar, 1995), maka tujuan pendidikan di era reformasi lebih fundamental, yakni:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Presiden Indonesia, 2003).

Namun demikian, harus diakui tujuan pendidikan sebagaimana UU Sisdiknas tahun 2003 belum bisa terlaksana sesuai harapan. Alasan klasik yang dijadikan sebagai pembenar dari kealfaan pelaksanaan darinya pun beragam. Mulai dari persoalan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah pendidikan (demografi), perbedaan budaya dan adat istiadat hingga minimnya anggaran belanja di bidang pendidikan nasional. Poin terpenting yang harus dipahami adalah setiap rezim pemerintahan senantiasa berusaha memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan warga negara, akan tetapi belum mampu memenuhi harapan mulia tersebut.

PERSOALAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DI MASA MENDATANG

Laiknya yang diramalkan para futurolog, bahwa di abad ini masa depan dunia, tak terkecuali dunia pendidikan penuh ketidakjelasan. Pelbagai kejadian bergerak begitu cepat, dan masif. Gibson (1997) sebagaimana dikutip oleh Djohar MS mengatakan, bahwa kejadian di bumi sekarang ini tidak lagi bergerak linier, sehingga kita tidak akan mampu melihat masa depan dengan pikiran linier melalui pertimbangan masa lampau dan masa kini (Djohar MS, 2003).

Domain pendidikan nasional yang menjadi persoalan krusial setidaknya ada dua hal, yakni: (1) evaluasi pendidikan, dan (2) pemikiran untuk memfungsikan pendidikan (Djohar MS, 2003). Dibidang evaluasi pendidikan persoalan yang krusial adalah (a) pendidikan kita telah kehilangan objektivitasnya; (b) pendidikan kita tidak mendewasakan peserta didik; (c) pendidikan kita tidak menumbuhkan pola berpikir; (d) pendidikan kita tidak menghasilkan manusia terdidik; (e) pendidikan kita dirasa membelenggu; (f) pendidikan kita dirasa linier-indoktrinatif; (g) pendidikan kita belum mampu menghasilkan kemandirian, dan; (h) pendidikan kita belum mampu memberdayakan dan membudayakan peserta didik.

Di sisi lainnya, persoalan terkait dengan pemikiran untuk memfungsikan pendidikan dibutuhkan adanya: (a) "peace education"; (b) pendidikan yang mampu membangun kehidupan demokratis; (c) pendidikan yang mampu membutuhkan semangat untuk menjunjung tinggi HAM, dan; (4) pendidikan yang mampu membangun keutuhan pribadi manusia berbudaya (Djohar MS, 2003). Selain itu, persoalan berikutnya yang menjadi sorotan tajam belakangan ini adalah: (1) persoalan kurikulum; (2) rendahnya kualitas guru. Akibat dari minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas guru; (3) lemahnya budaya literasi; (4) rendahnya kualitas buku (Iradhatie Wurinanda, 2015).

Bahkan, tatkala Anies Baswedan masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dalam laporan pernah mengatakan bahwa wajah pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih buruk, antara lain: (1) sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan; (2) nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75; (3) Indonesia berada dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan, menurut lembaga *The Learning Curve*; (4) dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 49, dari 50 negara yang diteliti; (5) pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65

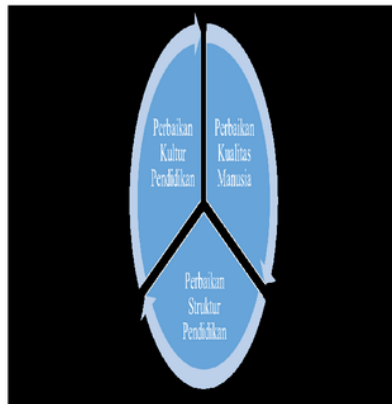
negara yang dikeluarkan oleh lembaga *Programme for International Study Assessment (PISA)*, pada tahun 2012. Tren kinerja pendidikan Indonesia pada pemetaan PISA pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, cenderung stagnan; (6) Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap-menyuap dan pungutan liar (Akbarwati, n.d.).

Selain itu, Anies mengatakan, dalam dua bulan terakhir, yaitu pada Oktober hingga November 2015, angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230 kasus. Kejahatan terorganisir juga menjadi masalah dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan mengenai kejahatan terorganisir di bidang pendidikan ini Indonesia berada di peringkat 109 dunia (Akbarwati, n.d.).

Di sisi yang lainnya, menurut Sumarna Surapranata, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada saat Seminar Pendidikan mengemukakan bahwa tantangan pendidikan dewasa ini diantaranya: (1) harmonisasi pengembangan potensi siswa yang belum optimal antara olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik); (2) besarnya populasi siswa, guru, dan sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia; (3) belum optimalnya sinergi tanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak antara sekolah, orang tua dan masyarakat; (4) tantangan globalisasi. Pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi terhadap gaya hidup remaja, serta pudarnya nilai-nilai religiusitas dan kearifan lokal bangsa; (5) terbatasnya pendampingan orang tua mengakibatkan krisis identitas dan disorientasi tujuan hidup anak; (6) keterbatasan sarana belajar dan infrastruktur. Prasarana dan sarana sekolah, sarana transportasi, jarak antara rumah siswa ke sekolah (jalur sungai, hutan), sehingga PPK diimplementasikan bertahap (Surapranata, 2016).

Dengan demikian, pelbagai persoalan pendidikan nasional di Indonesia yang kompleks, dan berat tersebut merupakan tantangan yang harus segera diurai. Menurut hemat saya, ada tiga hal yang harus dilakukan: (1) perbaikan kualitas manusia; (2) perbaikan struktur pendidikan; (3) perbaikan kultur pendidikan. Lihat Gambar 3. berikut ini:

Gambar 3.
Perbaikan Pendidikan Di Indonesia



Perbaikan kualitas manusia dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia. pengembangan SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu jalur yang paling penting

adalah melalui jalur pendidikan formal mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Pengembangan SDM dapat juga dilakukan melalui kursus-kursus/ pelatihan bagi pihak yang sedang bekerja (*in servis training*). Di samping itu, pengembangan SDM juga dapat melalui aktifitas dalam organisasi, baik politik, sosial, dan agama. Lebih dari itu, dapat juga melalui jalur mandiri atau autodidak (*self-development*) (Irianto, 2013).

Perbaikan struktur pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pemangku kepentingan di level sekolah formal, maupun non formal. Pelbagai pelatihan, dan *workshop* kepala sekolah, pimpinan di level SKB perlu diformat sedemikian rupa sehingga kompetensi mereka senantiasa meningkat. Perbaikan kualitas kepala sekolah, dan pimpinan SKB berdampak secara signifikan terhadap kualitas kepemimpinan mereka di masing-masing lembaga.

Perbaikan kultur pendidikan dapat dilakukan melalui pembudayaan kultur demokrasi di sekolah, pewujudan adanya iklim tenggang rasa antar warga sekolah (budaya multikultural), dan penanaman budaya gotong royong, penanaman budaya kerja keras, penanaman budaya malu, penanaman budaya anti korupsi, penanaman budaya *asah, asih, asuh*, dan penanaman kebhinekaan.

Oleh karena itu, ketiga upaya perbaikan tersebut di atas, diperlukan kerja kolaboratif dari semua pihak secara simultan, dan sinergi. Muaranya, agar cita-cita mulai pewujudan tujuan pendidikan nasional bukan hanya sekadar “pepesan kosong” belaka, melainkan kenyataan yang *real* adanya.

KESIMPULAN

Dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia dari rezim pemerintahan orde lama hingga orde reformasi selalu bergantung pada visi kepemimpinan seorang presiden. Arah, tujuan pendidikan nasional pun demikian adanya. Ia selalu dinamis, dan adaptif dengan kepentingan penguasa. Kebijakan pendidikan pun akhirnya bersenyawa, dan melekat dengan politik pendidikan itu sendiri. Resiko logisnya, setiap ganti presiden, ganti pula kebijakan dibidang pendidikan. Praktis, keberlanjutan program, dan kebijakan pendidikan tergantung masa jabatan sang penguasa.

Persoalan pendidikan di Indonesia semakin kompleks, seiring perkembangan zaman. Salah satu cara efektif dalam mengurai kompleksitas persoalan pendidikan adalah terkait dengan kebijakan pendidikan yang tepat guna, dan efektif guna. Perbaikan kualitas manusia, perbaikan struktur pendidikan, dan perbaikan kultural pendidikan secara efektif terlaksana jika kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarwati, I. (n.d.). *Anies Baswedan Nyatakan Pendidikan Indonesia Gawat Darurat*. Indonesia. Retrieved from <http://jurnal.selasar.com/budaya/anies-baswedan-nyatakan-pendidikan-indonesia-gawat-darurat>
- Buchori, M. (1994). *Pendidikan dalam Pembangunan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.

- Djohar MS. (2003). *Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. (A. Darmawan, Ed.). Yogyakarta: LESFI.
- Hartono, Y. (1999). Pendidikan dan Kebijakan Politik Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi. *Jurnal Agastya*, 6. No. 1, 35–45.
- Iradhatie Wurinanda. (2015, November). Empat Masalah Utama Pendidikan Indonesia. [Http://news.okezone.com](http://news.okezone.com). Indonesia.
- Irianto, H. A. (2013). *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Malla, H. A. B. (2011). Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Inspirasi*, XIV(October), 13.
- Mukodi. (2015). Tantangan Profesionalisme Guru Menyongsong Indonesia Emas 2030.
- Nurtanio Agus Purwanto. (2008). Perjalanan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. In: *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Pratomo, Y. (2015, April). Cerita pesawat buatan Indonesia ditukar beras Thailand. Jakarta.
- Presiden Indonesia, R. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Sardjoko, S. (2016). *Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui Revitalisasi LPTK*. Jakarta.
- Statistik, B. P. (2011). *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010 Keterkaitan Antara IPM, IPG, dan IDG*. Jakarta.
- Statistik, B. P. (2016). *Indek Pembangunan Manusia 2015*. Indonesia.
- Surapranata, S. (2016). *Standar Mutu dan Profesionalisme Guru*. Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 Suatu Analisis Kebijakan*. Indonesia: PT. Grasindo.

DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA SEBUAH REFLEKSI HISTORIS

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ matsmpbeltim.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On